



KLAIM KOSONG

Bagaimana Pendanaan Batubara Menembus Celah Paris Alignment oleh IFC

Publikasi oleh Inclusive Development International,
Recourse dan Trend Asia

Oktober 2023

Untuk informasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang diangkat dalam laporan ini mohon hubungi:

Inclusive Development International

9 SW Pack Square Suite 301
Asheville, NC 28801 AS

Telp. +1 (828) 505-4340

info@inclusivedevelopment.net

Inclusive Development International berupaya untuk memajukan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan mendukung komunitas di seluruh dunia dalam membela hak asasi manusia dan lingkungan mereka di tengah aktivitas korporasi yang merugikan. Kenali kami lebih lanjut di:

www.inclusivedevelopment.net

©2023 Inclusive Development International. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Semua konten yang ada dalam publikasi di sini tunduk pada syarat dan ketentuan Lisensi Hak Cipta Inclusive Development International yang dapat ditemukan di:

www.inclusivedevelopment.net/wp-content/upload/2022/06/IDI-CALCopyrightLicense.pdf



Penambangan batubara mengancam kualitas kehidupan di Provinsi Jambi, Indonesia.

International Finance Corporation (IFC), anggota Grup Bank Dunia, telah berkomitmen untuk tidak lagi mendanai proyek-proyek yang berhubungan dengan batubara. Namun, investigasi yang dilakukan oleh Inclusive Development International, Recourse, dan Trend Asia menunjukkan bahwa IFC secara tidak langsung masih menyokong beberapa pengembang batubara terbesar di Asia.

Provinsi Jambi membentang dari wilayah berpasir putih dengan air yang jernih di pantai timur Sumatera hingga Bukit Barisan yang menghijau di bagian barat. Provinsi ini berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, wilayah habitat harimau Sumatera yang terancam punah masih banyak berkeliaran. Namun jika dipandang dari atas, jelas terlihat bahwa provinsi ini telah dirusak oleh industri jalan tol. Hutan Sumatera yang merupakan rumah bagi lebih dari 100 spesies hewan yang terancam punah, telah diganggu oleh noda hitam tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit dengan pola keseragaman yang tidak alami.

Sebagai rumah bagi lebih dari puluhan lubang tambang batubara, Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penghasil batubara terpenting di Indonesia. Meskipun demikian, hal ini membawa masalah bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tambang yang mengalami kualitas udara dan air yang memburuk. Penduduk desa

menyatakan bahwa polusi telah membuat mereka sakit dan juga mengancam penghidupan mereka yang bergantung pada sumber daya alam.

Secara historis, batubara Sumatera diekspor untuk digunakan di berbagai tempat. Industri batubara di Jambi yang menghasilkan 13 juta metrik ton per tahun memiliki daya tarik bagi para pengembang yang ingin mengolah batubara tersebut menjadi tenaga listrik dan menghasilkan profit. Hingga saat ini, tersiar adanya rencana untuk membangun 14 pembangkit listrik tenaga batubara baru di pulau tersebut yang tentu akan menimbulkan risiko baru bagi penduduk setempat dan akan meningkatkan permintaan akan produksi batubara. Hal ini jelas akan semakin merugikan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah rencana pembangunan tersebut.

Sebuah investigasi yang dilakukan oleh Inclusive Development International, Recourse, dan Trend Asia mengungkapkan bahwa bank pengembang terkemuka di dunia, International Finance Corporation (IFC), yang merupakan bagian dari Grup Bank Dunia, secara tidak langsung menyokong beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. IFC mendanai proyek-proyek tersebut melalui investasi pada pihak ketiga yang dikenal sebagai perantara keuangan, yang kemudian menyalurkan dana miliaran dolar kepada beberapa perusahaan pengembang batubara terbesar di dunia.

Sejauh ini, pemodal terbesar bagi perusahaan pengembang batubara dalam portofolio IFC adalah Postal Savings Bank of China.

IFC mengambil bagian i kepemilikan atas Postal Savings Bank of China pada tahun 2015. Bank ini mengalokasikan dana sebesar 418 miliar RMB (\$57,2 miliar) atau senilai sekitar 80 triliun rupiah dalam bentuk pinjaman tanpa agunan kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola puluhan pembangkit listrik tenaga batubara di wilayah Jambi. Postal Savings Bank telah/masih memfasilitasi jalur pinjaman ini ketika sebagian besar industri keuangan mulai berpaling dari batubara.

Di antara sejumlah pembangkit listrik yang secara tidak langsung didukung oleh IFC ini terdapat pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 700 megawatt (MW) yang disebut Jambi 2. Pembangkit Listrik Tenaga Batubara ini rencananya akan ditempatkan di jalan masuk menuju salah satu dari sekian banyak tambang batubara di wilayah tersebut. Proyek ini dinilai para aktivis setempat sebagai proyek yang tidak diinginkan dan tidak dibutuhkan oleh Jambi. Meskipun demikian, Postal Savings Bank of China telah memberikan fasilitas pinjaman kepada perusahaan pengembangnya, China Huadian.

“Hal ini tidak benar,” kata Abdul, seorang juru kampanye Walhi Jambi, dari LSM lingkungan tertua dan terbesar di Indonesia. Ia menyatakan bahwa investasi IFC secara langsung mendukung penderitaan dan digunakan “untuk mendukung perusakan lingkungan, memusnahkan lahan yang tersisa.”

Terungkapnya keterlibatan IFC dalam pengembangan batubara di Sumatera bukanlah kasus satu-satunya. Investigasi yang dilakukan oleh Inclusive Development International, Recourse, dan Trend Asia menemukan bahwa IFC juga terlibat dalam kegiatan pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 68.3 gigawatt (GW), hampir dua kali lipat dari kapasitas listrik tenaga batubara di Jerman, baik berupa pembangkit listrik baru yang telah beroperasi sejak tahun 2019, proyek-proyek yang sedang direncanakan, atau pembangkit listrik yang sedang dalam tahap konstruksi. Sejauh ini, terdapat 39 proyek pembangkit listrik tenaga batubara yang tersebar di Tiongkok, Indonesia, dan Kamboja.

Paparan IFC terhadap pengembangan batubara baru di Asia

Relasi IFC (Perantara Keuangan)	Jumlah Proyek Tambang Baru	Total Pembiayaan	Total Daya (dlm gigawatt)
Postal Savings Bank of China	36	\$57.3 milyar	62.07
KEB Hana Indonesia	2	\$530 juta	4.2
Dana Kerjasama Investasi China-ASEAN	1	Investasi Ekuitas (Jumlahnya Tidak Diungkapkan)	2.03

Metodologi Penelitian

Untuk menyusun laporan ini, Inclusive Development International menelusuri dana IFC melalui sejumlah perantara keuangan ke berbagai pembangkit listrik tenaga batubara yang baru di Asia. Hasil lengkap penelusuran kami dapat diakses [di sini](#).

Kami membagi pembangkit listrik tenaga batubara baru ke dalam beberapa kategori, yaitu: proyek-proyek yang telah beroperasi sejak tahun 2019; proyek-proyek yang sedang dalam tahap konstruksi; dan proyek-proyek yang sudah diumumkan oleh para pengembang. Data ini tidak termasuk proyek yang terdaftar sebagai proyek yang ditangguhkan atau dibatalkan, meskipun pengembang secara rutin mengaktifkan kembali proyek yang sudah lama tidak aktif atau ditangguhkan. Untuk seluruh data pembangkit listrik tenaga batubara, termasuk nama-nama proyek, kapasitas pembangkit listrik, jadwal pembangunan dan pemilik proyek, kami mengandalkan [Global Energy Monitor](#) yang memantau infrastruktur energi di seluruh dunia Sementara untuk data yang berkaitan dengan pengembang proyek dan kapasitas produksi batubara mereka saat ini, rencana pembangunan serta penerbitan obligasi, kami mengandalkan [Global Coal Exit List](#) yang juga digunakan oleh IFC saat membantu klien mereka dalam mengidentifikasi paparan terhadap sektor batubara pada portofolio mereka.

Data lain yang tercakup dalam laporan ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Inclusive Development International, Recourse, dan Trend Asia terhadap pengarsipan perusahaan, pengungkapan proyek International Finance Corporation, dan kunjungan lapangan di Indonesia.

Investigasi kami mengungkapkan bahwa Bank Dunia, meskipun telah berjanji akan menghentikan pendanaan untuk pengembangan batubara dan sejalan dengan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim, namun secara tidak langsung masih terus menyokong sektor yang menurut para ahli merupakan salah satu kontributor paling signifikan terhadap emisi karbon dan kerusakan bumi akibat perubahan iklim.

Kebijakan Bank Dunia bukanlah satu-satunya kebijakan yang dinilai rancu. Terlepas dari [janji pemerintah Tiongkok](#) untuk tidak mengembangkan pembangkit listrik tenaga batubara baru di luar wilayahnya serta [komitmen pemerintah Indonesia](#) untuk berhenti membangun pembangkit listrik tenaga batubara baru di dalam negeri, proyek Jambi 2 mungkin masih akan berjalan dan menyebabkan masyarakat di sekelilingnya khawatir akan masa depan mereka.

Solusi Indonesia untuk permasalahan batubara

Pembangkit listrik berbahan bakar batubara, yang terlihat seperti lilin raksasa yang berasal dari kejauhan, memasok lebih dari sepertiga dari semua listrik di seluruh dunia.

Pembangkit listrik seperti ini adalah salah satu sumber emisi gas rumah kaca global terbesar. Sejumlah ahli meyakini bahwa langkah terpenting yang dapat kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim adalah menghentikan pengembangan dan penggunaan energi berbahan bakar batubara.

Saat ini, 27 negara di Asia, termasuk Indonesia, bertanggung jawab atas 76% produksi batubara global. Indonesia merupakan penghasil batubara terbesar ketiga di dunia, dan 60% dari listrik domestik Indonesia berasal dari sumber energi kotor ini.

Lebih dari satu dekade yang lalu, Indonesia keliru dalam memperkirakan kebutuhan listrik dan mendirikan pembangkit listrik lebih banyak dari yang dibutuhkan, seperti yang diakui oleh para pejabat pemerintah Indonesia. Situasi ini menempatkan Indonesia di jalur salah satu penghasil emisi karbon terbesar berdasarkan beberapa proyeksi. Namun, bahkan dengan banyaknya pembangkit listrik tenaga batubara yang menggerogoti sumber daya lokal, Indonesia memiliki lebih banyak batubara daripada yang dibutuhkan dan tetap menjadi pengekspor batubara termal terbesar di dunia untuk listrik.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2021, mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan proyek batubara baru yang pembangunannya belum terjadwal. Indonesia merupakan salah satu dari 40 negara yang membuat janji serupa. Setahun kemudian, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mencegah pemberian izin bagi pembangkit listrik tenaga batubara yang baru. Namun, pembangkit listrik berizin resmi atau proyek-proyek dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pemerintah diizinkan untuk tetap beroperasi.

Meskipun demikian perusahaan layanan listrik Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), belum mengindikasikan apakah Jambi telah mengantongi izin, dan menyatakan bahwa proyek terus berjalan dan berada di jalur yang semestinya hingga masa tutup buku. Hal ini meresahkan para aktivis dan warga setempat yang mengkhawatirkan bahwa proyek ini akan gagal.



Truk-truk batubara mewarnai kehidupan sehari-hari di Provinsi Jambi.

Menembus celah hukum: proyek-proyek baru meskipun ada komitmen internasional

Dalam waktu tiga tahun mendatang, warga desa pertanian kecil Lubuk Napal akan tinggal bersebelahan dengan pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 700 MW.

Jambi 2, yang pertama kali diusulkan oleh PLN pada tahun 2011, direncanakan akan dibangun langsung di sebelah rumah-rumah beratap rumbia milik sekitar 40 keluarga di desa tersebut.

Jambi 2 direncanakan berada di wilayah yang sudah lama terganggu oleh dampak batubara.



Desa Pemusiran hanya berjarak beberapa kilometer dari tiga tambang batubara besar.

Pembangkit ini akan dibangun kurang dari 15 kilometer dari Desa Pemusiran, sebuah daerah pertanian kecil di Jambi selatan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara lainnya telah dimulai dan hanya berjarak lima kilometer dari desa tersebut. Kawasan ini dipilih karena berdekatan dengan tiga tambang batubara utama. Saat ini, industri batubara telah mendominasi kehidupan sekitar 3.000 penduduk yang tinggal di sana.

Ribuan truk yang mengangkut batubara dari tambang-tambang memenuhi jalan provinsi yang hanya berkapasitas dua jalur. Kendaraan roda empat berbentuk kotak dan berwarna cerah menyumbat jalan-jalan arteri yang sempit di provinsi ini. Hal ini biasanya menyebabkan kemacetan lalu lintas yang terkadang berlangsung selama sehari-hari sehingga menghalangi warga untuk mengakses layanan penting, termasuk menyebabkan orang sakit meninggal di tengah kemacetan karena gagal mencapai rumah sakit tepat waktu.

Truk-truk berat ini juga menabrak dan menewaskan puluhan pejalan kaki setiap tahun. Mereka merusak dan memperburuk kondisi jalan yang diandalkan para pengemudi setempat untuk pergi dari desa ke kota- untuk bekerja atau untuk belanja kebutuhan sehari-hari.



Tiga tambang batubara besar terletak hanya beberapa kilometer dari Desa Pemusiran.

Sebelum adanya tambang-tambang ini, kondisi air dari sungai yang melintasi kota dan berbatasan dengan hutan masih cukup bersih untuk masyarakat memancing, mandi, dan minum. Tambang-tambang batubara ini menjadikan hal tersebut mustahil untuk dilakukan di masa sekarang.

Warga setempat menduga bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan membuang limbah cair ke dalam sungai yang sekarang berwarna coklat dan keruh. Warga yang beraktivitas di sungai mengeluhkan masalah kesehatan, seperti kulit yang gatal. Beberapa anak mereka juga sakit dan mengalami pengelupasan kulit di sela-sela jari tangan dan kaki. [Penelitian ini](#) mengungkapkan bahwa anak-anak yang tinggal di dekat tambang batubara berisiko lebih tinggi terkena penyakit kulit.

Anggota masyarakat yang tinggal di Pemusiran berbicara kepada penulis laporan ini secara anonim karena mengkritik industri batubara dapat berdampak buruk bagi masyarakat dan keluarga yang mengandalkan pertambangan sebagai mata pencaharian mereka.



Sungai Pemusiran berwarna coklat dan keruh. Warga setempat menduga perusahaan pertambangan membuang limbah ke sungai

Sembari duduk bersila di lantai dangau, seorang pria paruh baya dengan rambut beruban dan memakai sarung berkata bahwa dahulu beliau sering memancing di sungai terdekat. Namun sejak tambang pertama mulai beroperasi pada tahun 2008, hasil memancingnya semakin sedikit. Beliau hampir tidak berhasil menangkap apapun dalam 15 tahun terakhir dan akhirnya menyerah. Sekarang beliau bekerja di perkebunan karet di mana beliau melihat kulit daun pepohonan karet menguning. Beliau meyakini bahwa kualitas karet juga menurun sebagai imbas dari polusi di daerah tersebut. Hasil panen karet yang berwarna putih susu menjadi lebih sedikit, dan penghasilannya pun merosot.



Seorang pekerja perkebunan karet berpendapat bahwa penambangan batubara di daerah tersebut mempengaruhi kesehatan pohon karet.

Mata pencaharian petani lainnya juga terganggu. Hilangnya habitat monyet telah menyebabkan primata ini mendekati ke kota sehingga menimbulkan masalah bagi para petani yang menanam cabai, pisang, manggis, dan rambutan.

Seorang tetua masyarakat bertangan keriput yang mengenakan songkok lonjong tradisional, mengenang masa-masa sebelum adanya tambang batubara di dekat desanya. Pada saat tambang-tambang itu masuk, beliau sudah terlalu tua untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan baru yang dibuka. Beliau mengatakan bahwa bagi mereka yang berada di usia produktif, tambang-tambang tersebut menyediakan lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, kesempatan tersebut meninggalkan orang-orang seperti dirinya yang harus menanggung dampak dari penambangan batubara tanpa ada manfaat ekonominya. Beliau menuturkan bahwa bahkan untuk anggota komunitasnya yang lebih muda, lowongan yang tersedia diperuntukkan bagi pemula dan pekerja kasar (kerah biru). Sementara, penduduk setempat tidak mendapatkan keuntungan dari posisi administratif dengan gaji yang lebih tinggi.

Seorang pemuda yang beliau kenal mendapatkan salah satu pekerjaan kerah biru. Sewaktu berbicara dengan penulis di suatu hari yang panas, pemuda itu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, meskipun demikian dia pernah menyaksikan rekan-rekan kerjanya jatuh sakit karena asma dan masalah pernapasan lainnya. Akan tetapi, perusahaan tambang belum mengakui adanya masalah tersebut, dan dia mengatakan bahwa perusahaan tambang tersebut meminta para pekerja yang sering sakit untuk mengundurkan diri.



Seorang pekerja tambang mengatakan bahwa rekan-rekannya memiliki masalah kesehatan yang tidak ditanggapi secara serius oleh manajemen perusahaan.

Akses masuk ke tambang batubara di daerah ini terletak di jalan utama menuju Desa Pemusiran, ditandai dengan jalan berkerikil mengelilingi lubang-lubang hitam yang tersebar luas membelah lereng bukit hijau. Truk-truk batubara terlihat berseliweran di pintu keluar, menunggu hingga pukul 18.00 saat mereka diizinkan melintasi jalan provinsi.

Debu batubara juga mengganggu warga desa. Debu tersebut berasal dari mesin-mesin tambang yang terbawa angin dari penimbunan yang berjarak hanya beberapa kilometer dari desa tersebut serta truk-truk pengangkut batubara yang selalu memenuhi jalan. Akibatnya, orang-orang yang tidak bekerja di tambang pun mengalami batuk berkepanjangan.



Seorang tetua masyarakat di Desa Pemusiran berpendapat bahwa ia hanya melihat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh tambang batubara di sekitarnya, dan tidak ada manfaatnya.



Debu batubara memicu gangguan pernapasan bagi masyarakat yang tinggal di dekat tambang batubara di Jambi.

Jika Jambi 2 dan PLTU batubara lainnya dibangun di Sumatera, penambangan batubara akan terus berlanjut dan akan semakin gencar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar PLTU tersebut.

Selain berperan dahsyat dalam mempercepat pemanasan global, pembangkit listrik tenaga batubara juga mengakibatkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Penelitian telah membuktikan bahwa mereka yang tinggal di dekat pembangkit listrik tenaga batubara meninggal di usia yang relatif muda dan menghadapi peningkatan risiko kanker paru-paru, penyakit pernapasan, dan kardiovaskular. Penambangan yang dikombinasikan dengan pembangkit listrik yang baru beroperasi akan memperburuk masalah kualitas udara dan air yang sudah dialami oleh masyarakat seperti Desa Pemusiran.

Anggota masyarakat di Pemusiran menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan banyak edukasi mengenai dampak potensial dari bermukim di dekat pembangkit listrik tenaga batubara. Namun tampak jelas bahwa mereka sangat khawatir atas kesejahteraan teman dan keluarga mereka, serta dampaknya terhadap pertanian.

Abdul, anggota Walhi Jambi, mengatakan bahwa masyarakat akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari pembangunan jenis lain. “Mereka lebih membutuhkan sesuatu yang dapat menjadikan produk pertanian mereka lebih bernilai, seperti harga yang lebih tinggi untuk kelapa sawit dan karet,” ujarnya. Ia yakin bahwa pembangkit listrik tenaga batubara yang baru tidak dibutuhkan. “Kita punya sumber energi lain yang tersedia.” Sebuah studi yang dilakukan oleh International Energy Agency yang bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia menyimpulkan bahwa potensi tenaga surya memainkan peran yang lebih besar dalam memasok listrik di pulau ini. Penelitian lain menemukan bahwa ada sumber daya tenaga air yang belum dimanfaatkan di pulau ini.

Masyarakat tidak yakin tentang apa yang akan dihadapi di masa depan

Bagi masyarakat yang tinggal di Provinsi Jambi, ada banyak pertanyaan daripada jawaban perihal masa depan proyek Jambi 2. Ketidakjelasan kesepakatan antara PLN dan perusahaan utama yang mengembangkan proyek ini, yaitu China Huadian, menyebabkan masyarakat dan para aktivis tidak memiliki informasi yang lengkap.

Hingga saat ini, kedua perusahaan masih bungkam mengenai status dan rencana proyek tersebut meski telah berulang kali diminta untuk memberikan informasi. Tidak ada alasan yang jelas atas bungkamnya mereka.

China Huadian merupakan satu dari lima perusahaan pembangkit listrik milik negara terbesar yang didirikan pada masa reformasi sistem tenaga listrik nasional di Tiongkok. Perusahaan ini telah mengembangkan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia selama bertahun-tahun. Pada bulan Mei 2018, China Huadian Hong Kong Co, Ltd., anak perusahaan China Huadian Corporation, menandatangani perjanjian jual-beli tenaga listrik untuk pembangkit listrik Jambi 2 dengan PLN untuk memasok listrik ke daerah setempat.

Laporan berita tentang pengumuman tersebut menyatakan bahwa Jambi 2 akan “mengatasi kekurangan listrik setempat, mengurangi biaya konsumsi listrik setempat, meningkatkan pendapatan pajak sehingga dapat menstimulasi penambahan lapangan kerja, dan memicu pembangunan sosial dan ekonomi setempat.” Namun, para aktivis di Jambi mengatakan bahwa risiko proyek ini jauh lebih besar daripada manfaat yang dinyatakan.

Perjanjian tersebut menetapkan bahwa dua unit akan dikembangkan dan dibangun dalam skema kontrak bangun-guna-milik (Build-Own-Operate-Transfer). Meskipun rincian dari jenis kontrak ini tidak dipublikasikan, susunan seperti ini secara umum berarti bahwa China Huadian akan menjadi pemilik proyek selama jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak. China Huadian kemungkinan akan melakukan investasi ekuitas dalam proyek tersebut dan mengupayakan pendanaan terpisah.

Namun, komitmen tingkat tinggi dari pemerintahan Tiongkok kemungkinan besar akan mempersulit keadaan. Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2021, Presiden Xi Jinping berjanji bahwa Tiongkok tidak akan membangun proyek pembangkit listrik tenaga batubara baru di luar negeri. Menyusul pengumuman tersebut, China Huadian mengambil langkah positif dengan membentuk kelompok kerja untuk mengkaji proyek-proyek batubara di luar negeri. Tak lama setelah itu, pada bulan Januari 2022, perusahaan tersebut menyatakan melalui akun media sosial resminya di Tiongkok bahwa mereka telah “dengan tegas” mengundurkan diri dari Jambi 2 untuk mengikuti kebijakan negaranya mengenai energi batubara di luar negeri.

Terlepas dari pernyataan publik tersebut, PLN bersikukuh dalam sebuah email kepada penulis laporan ini bahwa China Huadian masih mengembangkan proyek tersebut dan perjanjian jual-beli listrik antara kedua belah pihak masih berlaku. Dalam email pada bulan September 2023, PLN juga mengatakan bahwa proyek ini sedang menuju tahap penyelesaian finansial. China Huadian tidak menanggapi permintaan komentar untuk laporan ini dan juga tidak menjawab permintaan dari organisasi masyarakat sipil terkait perkembangan status proyek.

Pernyataan mundurnya China Huadian merupakan perkembangan yang menggembirakan bagi warga setempat. Namun, perusahaan ini masih belum menjelaskan bagaimana mereka akan meninggalkan perjanjian jual-beli listrik yang telah ditandatangani dengan PLN. Perusahaan ini juga belum mengatakan apakah mereka akan menjual sahamnya di proyek ini kepada pengembang lain atau tidak. Meskipun perusahaan ini mungkin masih ingin menghormati komitmen Presiden Xi untuk tidak membangun proyek-proyek batubara baru di luar Tiongkok, namun masih belum jelas apakah perusahaan ini akan menindaklanjutinya.



Cerobong asap pembangkit listrik Banten Suralaya menghitamkan langit di dekat Cilegon, Indonesia.

Pesan-pesan IFC yang tidak konsisten

Jika proyek ini dilanjutkan, IFC akan secara tidak langsung mendukung satu lagi pembangkit listrik tenaga batubara yang sudah direncanakan dan beroperasi.

Dalam 15 tahun terakhir, anak usaha dari Bank Dunia ini telah mengalihkan lebih dari separuh total operasi pendanaannya yang berupa pinjaman langsung kepada proyek dan perusahaan, menjadi investasi melalui perantara keuangan seperti bank-bank komersial dan dana ekuitas swasta. Pihak ketiga ini menginvestasikan dana IFC dengan supervisi yang minim dan hasil yang terkadang kacau.

Inclusive Development International menelusuri pendanaan dalam portofolio sektor keuangan IFC dan mengungkap pembangkit listrik tenaga batubara, korporasi pelanggar hak asasi manusia, dan tambang-tambang perusak yang secara tidak langsung disokong IFC dalam seri investigasi [Outsourcing Development](#).

Menanggapi tekanan dari sejumlah LSM, Grup Bank Dunia telah membuat [serangkaian komitmen](#) yang dirancang untuk merombak kebijakannya dalam berinvestasi di lembaga keuangan, mengurangi keterlibatannya dalam batubara, dan [menyesuaikan diri dengan](#)

[Perjanjian Paris](#). Hal paling menonjol adalah pada tahun 2019 IFC [meluncurkan Pendekatan Ekuitas Hijau](#), yang mewajibkan lembaga keuangan yang sahamnya dimiliki IFC untuk mengurangi separuh kepemilikan batubara pada tahun 2025 dan menghapusnya dari portofolio mereka pada akhir dekade ini.

Pada tahun 2023, IFC menutup celah penting yang disorot oleh Inclusive Development International, Recourse, dan Trend Asia dalam pendekatan tersebut dengan [memperbarui kebijakan](#) untuk membatasi klien ekuitas dalam membiayai proyek batubara baru. Namun, pendekatan utama IFC yang menyelaraskan operasi pinjaman tidak langsungnya dengan Perjanjian Paris memiliki celah dan kerancuan lainnya, seperti: IFC masih mengizinkan klien ekuitas untuk menanggung obligasi bagi pengembang batubara dan mengizinkan klien untuk membiayai proyek-proyek industri yang pasokan listriknya masih didukung oleh pembangkit listrik tenaga batubara khusus, sebuah konsep yang dikenal sebagai *captive coal*. Hingga saat ini, masih belum jelas bagaimana dan apakah kebijakan “tidak ada batubara baru” diterapkan pada pembiayaan korporat klien yang sudah ada untuk pengembang batubara.



Abdul, anggota Walhi Jambi, salah satu cabang Walhi Indonesia, menyebut dukungan IFC untuk Jambi 2 tidak etis.

Faktanya, penelitian mengungkapkan bahwa bank-bank yang sahamnya dimiliki IFC terus menyuntikkan dana kepada para pengembang proyek-proyek batubara baru. Proyek-proyek ini berdampak serius terhadap pemanasan global dan menimbulkan masalah bagi warga setempat yang berdomisili di wilayah proyek-proyek tersebut.

Jambi 2 merupakan salah satu dari proyek-proyek tersebut. Pada tahun 2015, IFC membeli saham di Postal Savings Bank of China, sebuah bank ritel yang berpusat di Beijing dengan nilai sekitar \$300 juta. IFC merasionalisasi investasi ini dengan menggarisbawahi peran yang dapat dimainkannya dalam “memperluas cakupan keuangan di Tiongkok, mengingat Postal Savings Bank of China adalah pemberi pinjaman penting bagi usaha kecil dan menengah serta pendanaan pedesaan.” Namun, IFC tidak membatasi bagaimana bank tersebut dapat memanfaatkan hasil investasinya.

Setelah menjadi klien perantara keuangan IFC, Postal Savings Bank of China memberikan pinjaman dalam jumlah yang semakin besar kepada China Huadian, sebagai pihak pengembang proyek Jambi 2. Pinjaman ini dapat digunakan selama kegiatan operasionalnya, termasuk untuk mengembangkan proyek-proyek seperti Jambi 2 dalam hal-hal seperti mempekerjakan kontraktor untuk studi kelayakan, survei, dan desain proyek.

China Huadian memperoleh akses fasilitas pinjaman sebesar 110 miliar RMB pada akhir tahun 2021; data perusahaan, jumlah pinjaman tersebut ditingkatkan oleh Postal Savings Bank menjadi 123 miliar RMB pada akhir tahun 2022, sehingga melanggar prinsip – jika tidak secara harfiah – dari berbagai komitmen anti-batubara dari Grup Bank Dunia.

Menurut investigasi Inclusive Development International, Recourse, dan Trend Asia, Postal Savings Bank of China secara keseluruhan telah mengucurkan dana sebesar 418 miliar RMB (\$57,3 miliar) dalam bentuk pinjaman dan pendanaan proyek kepada perusahaan-perusahaan yang mengembangkan berbagai pembangkit listrik tenaga batubara di wilayah tersebut.

Dengan demikian, IFC yang didanai para pembayar pajak dari negara-negara anggotanya, secara tidak langsung ikut terlibat dalam pengembangan proyek-proyek seperti Jambi 2.

“Itu berarti masyarakat secara tidak langsung mendukung percepatan kerusakan lingkungan kita. Bagi kami, ini sama sekali tidak etis,”

kata Abdul dari Walhi Jambi

[Global Coal Exit List](#), sebuah *database* perusahaan yang mengembangkan aset batubara beserta lembaga-lembaga keuangan pendukungnya, menunjukkan bahwa di luar proyek Jambi 2, China Huadian Corporation masih memiliki rencana ekspansi batubara sebesar 17,5 GW dan kapasitas batubara yang terpasang sebesar 89 GW. Melalui pinjaman dari Postal Savings Bank of China kepada China Huadian, IFC secara efektif mendukung semua proyek ini.

Di Sumatera Selatan, China Huadian merupakan pemilik 55% saham pembangkit listrik Bangko Tengah (SS-8), pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 1.200 MW. Pembangkit listrik ini seharusnya mulai beroperasi pada akhir tahun 2023. Proyek ini akan menjadi proyek pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang terbesar di Asia Tenggara.

Sebelum pembangunan tambang yang akan menyuplai kebutuhan listrik Bangko Tengah, kepala desa dan tokoh masyarakat adat memprotes pembebasan lahan untuk pertambangan batubara. Pengembangan batubara di daerah tersebut telah mengganggu habitat harimau yang mengakibatkan konflik antara manusia dan hewan ikonik tersebut. Bahkan sebelum PLTU selesai dibangun, polusi air dan dampaknya terhadap pertanian sudah

mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar tambang batubara.

Di Kamboja, China Huadian memiliki sebagian pembangkit listrik CIIDG-Huadian Sihanoukville Power Station, pembangkit listrik berkapasitas 700 MW yang mulai beroperasi pada tahun 2022. Pembangkit listrik ini terletak di sebelah tiga pembangkit listrik batubara lainnya yang mulai beroperasi antara tahun 2014 dan 2020. Sebelum pembangkit-pembangkit listrik ini dibangun, mereka menghadapi penolakan dan protes dari penduduk setempat. Warga setempat menyampaikan keluhan batuk dan iritasi kulit sejak PLTU Batubara mulai beroperasi di daerah tersebut. Pada bulan Juni 2019, lebih dari 40 keluarga secara resmi menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah provinsi. Persoalan ini kemungkinan akan semakin meningkat ketika PLTU Huadian mulai beroperasi pada tahun 2022. Pembangkit listrik ini merupakan pembangkit listrik tenaga batubara terbesar di Kamboja dengan kapasitas terpasang sebesar 700 MW, dan ketika beroperasi penuh akan meningkatkan kapasitas listrik batubara di negara tersebut hingga lebih dari dua kali lipat.

China Huadian bukanlah satu-satunya perusahaan pengembang batubara yang menerima pendanaan dari Postal Savings Bank of China. Pada tahun 2020, Postal Savings Bank of China memberikan fasilitas pinjaman sebesar 110 miliar RMB (\$15 miliar) kepada China Energy Investment Corporation, sebuah perusahaan energi milik pemerintah Tiongkok, dan penjamin emisi surat utang dan ekuitas senilai \$310 juta dari China Energy Investment Corporation.

China Energy Investment Group Corporation adalah pengembang Jawa 7, pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 2.100 MW, dengan kepemilikan saham sebesar 70%. Pembangkit listrik (yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2020), serta kapal tongkang pengangkut batubara yang digunakannya telah menyebabkan polusi dan rusaknya ekosistem laut yang melumpuhkan mata pencaharian nelayan setempat. Global Coal Exit List menunjukkan bahwa China Energy Investment Group Corporation memiliki rencana ekspansi batubara sebesar 26 GW dan kapasitas batubara terpasang sebesar 188 GW.

Inclusive Development International mempertanyakan bagaimana IFC menyesuaikan komitmennya untuk menelaraskan investasi sektor keuangan terhadap Perjanjian Paris

dengan investasi ekuitas yang sedang berjalan di perantara keuangan, seperti Postal Savings Bank of China yang mendanai para pengembang batubara terbesar di Asia. IFC menjawab dalam sebuah pernyataan melalui email bahwa mereka tidak dapat berkomentar mengenai portofolio klien perantara keuangan karena adanya perjanjian kerahasiaan dengan para klien.

Pembangkit listrik tenaga batu bara memainkan peran yang penting dalam mempercepat perubahan iklim, sehingga mengancam kehidupan di Bumi.

Pembangkit listrik tenaga batubara berperan penting dalam mempercepat perubahan iklim yang mengancam kehidupan di bumi. Menurut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), setiap skenario pengurangan emisi yang dapat menghindari dampak perubahan iklim yang makin parah melibatkan penghentian penggunaan batubara secara cepat.

Meskipun Grup Bank Dunia memiliki mandat untuk mendorong pembangunan secara berkelanjutan, terlihat jelas bahwa IFC lepas tangan terhadap pinjaman perantara keuangan, seperti yang ditunjukkan melalui investasinya di Postal Savings Bank of China, dapat sangat merugikan masyarakat setempat dan juga bagi planet ini. Meskipun [hampir semua bank pembangunan besar](#) telah berkomitmen untuk mengakhiri pendanaan batubara, namun celah-celah hukum yang ada memungkinkan para perantara keuangan mereka untuk terus mendukung proyek-proyek batubara baru. Salah satu pesan terkuat yang dapat disampaikan oleh komunitas internasional kepada sektor batubara adalah untuk menghentikan dana pembangunannya. Jika IFC serius dengan komitmen memanfaatkan investasi untuk mempercepat transisi energi bersih, IFC harus menutup semua celah yang memungkinkan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga batubara baru seperti Jambi 2 terus berjalan, terlepas dari konsensus global yang menyatakan bahwa proyek-proyek tersebut tidak boleh dilanjutkan.



**Inclusive
Development
International**

Inclusive Development International
9 SW Pack Square, Suite 301
Asheville, NC 28801 USA